
**Praktik Kewargaan Sehari-hari Sebagai Ketahanan Sosial Masyarakat
Tahun 1950-an (Sebuah Tinjauan Sejarah)**

Agus Suwignyo

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
email: suwignyo_agus@ugm.ac.id

Rhoma Dwi Aria Yuliantri

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta;
Kandidat Doktor Ilmu-ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
email: rhoma@uny.ac.id

ABSTRACT

This paper analyzed the people's practices of citizenship in Central Java during the 1950s using the conceptual frame of social resilience. The notion of resilience had so far been studied in terms of security, food and energy supplies, and social nets on natural disaster risk reduction. Meanwhile, the period of the 1950s in Indonesian history had attracted many studies to focused on political aspects, such as parliamentary system of governance, regionalism and the dreach of economic crises leading to a change in political regimes. During the 1950s the newly independent state of Indonesia had to struggle for physical, political and social infrastructures, partly as the post-Second World War recovery project.

This paper showed that, regardless of the difficult situation and limited financial sources, the Indonesian people during the 1950s proved themselves to be resilient. They took an active part in the daily communal life activities. By using historical method in analysing several newspapers of the 1950s, this paper argued that the people's participation in philanthropy programs, social organizations and solidarity movements, significantly formed a strong social tie in the presence of the weak Indonesian State. The people showed a type of citizenship through which a quality of social resilience was performed and contested. However, it was hard to identified the institutional pattern in these practices of citizenship.

Keywords: *Citizenship, Social Resilience, Indonesia, The 1950s*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji praktik kewargaan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, tahun 1950an dalam bingkai ketahanan sosial. Selama ini konsep ketahanan telah dipahami dalam konteks keamanan, ketersediaan pangan dan keberlanjutan energi, dan jaring sosial menghadapi darurat bencana alam. Di sisi lain, kajian tentang periode 1950an dalam sejarah Indonesia terfokus pada aspek politik menyangkut percobaan sistem pemerintahan, isu-isu regionalisme dan krisis ekonomi yang berujung pada pergantian rejim kekuasaan.

Artikel ini bermaksud menunjukkan bahwa pada periode 1950an itu, praktik kewargaan sehari-hari masyarakat menunjukkan pola yang jika dibaca dalam konsep kontemporer merupakan bentuk ketahanan sosial masyarakat. Periode 1950an merupakan masa-masa awal kemedederdekaan Indonesia dengan kondisi pasca perang yang membutuhkan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. Meskipun demikian, dalam kondisi struktur negara yang masih lemah itu masyarakat membuktikan kemampuan bertahan dan berpartisipasi dalam aneka dimensi kehidupan sehari-hari secara kolektif. Dengan metode sejarah untuk membaca berbagai berita surat kabar tahun 1950an sebagai sumber data primer, artikel ini menyimpulkan bahwa praktik kewargaan sehari-hari dalam bentuk program-program filantropis, perkumpulan sosial dan aksi gerakan sosial merupakan penanda ketahanan kolektif

masyarakat dalam menghadapi keadaan tak menentu akibat lemahnya negara ketika itu. Meskipun demikian, praktik kewargaan tersebut cenderung tidak memiliki struktur institusional yang baku.

Kata Kunci: *Kewargaan Sehari-hari, Ketahanan Sosial, Indonesia, Tahun 1950-an.*

PENGANTAR

Konsep ketahanan telah diteliti dalam banyak aspek menyangkut ketahanan keamanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sosial menghadapi kondisi darurat, misalnya akibat bencana alam. Pada berbagai aspek tersebut, makna ketahanan ditelaah dari perspektif permasalahan dan kebutuhan yang langsung dihadapi masyarakat saat ini. Secara khusus, kajian-kajian mengenai ketahanan sosial mengarah pada upaya-upaya advokasi untuk penguatan kapasitas institusi masyarakat. Sejumlah hasil penelitian menyoroti pentingnya program-program pemberdayaan. Misalnya, dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat di Desa Wisata Panglipuran Bali, gagasan mengembangkan desa wisata yang diterjemahkan ke dalam aneka program pendampingan dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia di desa tersebut (Andriyani dkk., 2017). Contoh lain adalah studi yang bertujuan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui optimalisasi program kelompok mandiri masyarakat. Studi di wilayah Yogyakarta ini merekomendasikan antara lain paket pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga (Ismail, 2015). Kajian-kajian tersebut sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang pengembangan strategi pendampingan masyarakat secara tepat sasaran.

Meskipun demikian, dengan mengangkat isu pemberdayaan, kajian-kajian yang telah ada tentang ketahanan sosial rupa-rupanya

berangkat dari paradigma dan anggapan tentang ketidakberdayaan masyarakat. Akibatnya, rekomendasi dalam kajian-kajian itu hampir seragam, yakni perlunya program pendampingan dan advokasi bagi kelompok sasaran. Bertolak dari paradigma ketidakberdayaan masyarakat, kajian-kajian tentang ketahanan sosial mencerabut masyarakat dari sejarah mereka sendiri. Artinya, pengalaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dinamika kehidupan sosial mereka sendiri sering tidak diperhitungkan.

Jauh sebelum munculnya institusi-institusi formal seperti negara dan organisasi-organisasi advokasi seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat sendiri telah menunjukkan kapasitas untuk menyelesaikan aneka persoalan yang mereka hadapi. Dengan kata lain, masyarakat memiliki *institutional knowledge* tentang ketahanan sosial di dalam sejarah sehari-hari mereka. Praktik untuk memproduksi *institutional knowledge* disebut sebagai praktik kewargaan (*citizenship*). Praktik kewargaan dicirikan oleh keterlibatan warga di dalam berbagai aspek dan kegiatan sosial sehari-hari. Sebagaimana dikatakan pakar klasik teori kewargaan T.H. Marshall, kewargaan mengimplikasikan adanya “*direct sense of community membership based on loyalty to a civilisation which is a common possession*” atau perasaan kuat sebagai anggota suatu komunitas berdasarkan peradaban yang dimiliki komunitas itu (Marshall, 2009: 151). Sayangnya, praktik-praktik produksi *institutional knowledge* warga sebagai wujud kewargaan sering terabaikan dan terlewatkan

dari kajian-kajian tentang ketahanan sosial dan jenis-jenis ketahanan lainnya. Dibaca dari perspektif ini, tinjauan sejarah tentang praktik kewargaan sehari-hari masyarakat menjadi penting dan relevan. Tujuannya, untuk memahami bagaimana suatu masyarakat telah memperkuat ketahanan sosial di tengah berbagai kondisi yang terus berubah, dengan cara mereka sendiri.

Artikel ini bertujuan mengulas praktik kewargaan sehari-hari masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa dan Madura tahun 1950-an dalam bingkai ketahanan sosial. Secara khusus, artikel ini bermaksud menggali bentuk-bentuk praktik kewargaan yang menunjukkan ketahanan sosial masyarakat ketika itu. Istilah ketahanan nasional tentu saja istilah kontemporer yang belum dipakai secara luas pada periode 1950-an. Pembacaan praktik kewargaan 1950-an sebagai bentuk ketahanan sosial disadari karena itu bersifat *post-factum*.

Ketahanan sosial secara konseptual didefinisikan sebagai kemampuan individu dan kelompok untuk secara tepat waktu bertindak ketika keadaan stabil dan segera beradaptasi, mengatur diri dan tetap aktif terlibat dalam merespons kondisi yang tak menentu (Leitch, 2017). Konsep tersebut mengandung tiga dimensi pokok, yaitu kemampuan atau kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengelola persoalan (*coping capacities*), kemampuan untuk menyesuaikan diri pada kondisi tak menentu (*adaptive capacities*), dan kemampuan berubah menyesuaikan tuntutan kondisi yang juga berubah (*transformative capacities*) (Keck & Sakdalporak, 2013:5).

Di sisi lain konsep kewargaan (*citizenship*) mengacu pada partisipasi dan pengakuan (*recognition*) atas peran dan posisi-sejajar (*equality*) individu-individu dalam proses

menjadi bersama suatu kelompok/masyarakat (Hooghe & Oser, 2015:4-5). Karena sifat rutin dan terus-menerusnya, kehidupan sehari-hari masyarakat membentuk institusi yang disebut bersifat kultural. Institusi yang dimaksud tidak harus berupa struktur keras suatu kelembagaan, tetapi bisa juga berupa jejaring kebiasaan yang memiliki landasan nilai kolektif dan fungsi yang merangkul sekaligus mengikat warga.

Institusi kultural sebagai wujud keseharian masyarakat dapat diamati misalnya dalam perkumpulan-perkumpulan sosial, aktivitas kolektif masyarakat dan gaya hidup yang mencerminkan orientasi modernitas mereka. Institusi kultural dalam wujud demikian pada praktiknya tidak bergantung pada keberadaan maupun ketidakberadaan negara, tetapi secara jelas merefleksikan bentuk partisipasi bermasyarakat. Kehidupan sehari-hari masyarakat adalah wujud kewargaan mereka *par excellence*. Artinya, kehidupan sehari-hari masyarakat adalah sebaik-baiknya wujud partisipasi kolektif individu rakyat di dalam kehidupan bernegara. Dinamika harian yang biasa-biasa saja tersebut merupakan wujud terbaik apa adanya dari makna menjadi warga dari sebuah struktur sosial-politik masyarakat.

Pada kasus Indonesia tahun 1950-an, umumnya studi-studi yang telah ada tidak mengulas aspek horisontal interaktif dari keterlibatan individu-individu warga di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Studi-studi yang ada cenderung berfokus pada aspek besar pembentukan struktur negara, baik menyangkut birokrasi pemerintahan, model politik kekuasaan, maupun proyek sosial untuk mobilisasi kewargaan. Studi Feith (1962) *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, dan studi Fakih (2013) *The Rise*

of *Managerial State in Indonesia*, misalnya, mengulas proses dinamika pembentukan pemerintahan sebagai bagian penting dari kewargaan politik (*political citizenship*). Pada kedua karya ini, perihal kewargaan melekat pada diskusi tentang perkembangan dan pembangunan infrastruktur politik negara, khususnya partai politik dan birokrasi. Percobaan penerapan sistem pemerintahan dibaca dalam upaya pembangunan institusi-institusi demokrasi melalui, antara lain, keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum. Kemunculan kewargaan politik yang melekat pada proses pembangunan infrastruktur politik negara pada tahun 1950-an, menurut Donald L. Horowitz, berakar kuat dan muncul kembali menjadi semacam cetakan atau *template* pada konteks perubahan politik pascakejatuhan Order Baru (Horowitz, 2013:60-61).

Artikel ini menerapkan metode sejarah. Tahap-tahap prosedural metode sejarah meliputi keseluruhan proses *heuristik* yaitu pemilihan dan pemilahan sumber, pembacaan dan perbandingan sumber secara kritis untuk menilai tingkat reliabilitas sumber, dan akhirnya penulisan narasi sejarah berdasarkan sumber-sumber tersebut (Kuntowijoyo, 2003). Sumber-sumber primer yang dipakai dalam artikel penelitian ini berupa koran-koran periode 1950-an, yang dikumpulkan dari Jogja Library Center, Perpustakaan Nasional Jakarta dan pusat-pusat dokumentasi lainnya baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Koran-koran tersebut adalah *Suara Masyarakat*, *Pemandangan*, *Kedaulatan Rakyat*, *Harian Umum*, *Sin Po* dan *Harian Rakyat*. Koran-koran —sebagai jurnal harian— memuat banyak peristiwa sehari-hari yang sifatnya *updated*. Karena itu, koran atau surat kabar harian merupakan jenis sumber primer yang paling dekat merekam dan merepresentasikan realitas sehari-hari.

PEMBAHASAN

Periode 1950-an Sebagai Konteks

Dalam konteks sejarah Indonesia, periode 1950-an merupakan periode ketika ketahanan sosial masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan dan telah dibuktikan. Periode ini adalah masa pembangunan pascaperang, yaitu Perang Dunia II (1942-1945) dan Perang Kemerdekaan (1945-1949). Periode ini dikatakan sebagai masa kritis karena adanya berbagai kondisi darurat yang dilingkupi oleh keterbatasan infrastruktur, minimnya anggaran pemerintah dan nihilnya pengalaman sebagai bangsa yang bernegara. Sering dinamai sebagai masa mengisi kemerdekaan, periode 1950-an merupakan tahun-tahun awal ketika pucuk-pucuk pimpinan kekuasaan berupaya mewujudkan makna kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 1945. Upaya ini antara lain berupa program-program pembangunan *nation building* dan *state building*.

Di dalam bingkai *nation and state building* tahun 1950-an, elit negara, yaitu para birokrat pemerintahan cenderung beranggapan bahwa rakyat tidak/belum memahami makna menjadi bangsa. Massa rakyat yang digambarkan begitu aktif terlibat dan berpartisipasi selama perang merebut kemerdekaan 1945-1949, pada tahun 1950-an dimunculkan dan digambarkan oleh elit pemerintah sebagai kumpulan orang-orang yang pasif dan tidak punya gairah dalam kehidupan bersama. Dengan kata lain, massa-rakyat tahun 1950-an dipresentasikan sebagai emblem atau tempelan yang keaktifan dan keikutsertaannya dalam dinamika masyarakat hanya merupakan hasil atau akibat dari stimulasi negara.

Elit-elit politik dan pemerintahan di tahun 1950-an menjadi kunci dalam perumusan konsep tentang negara dan

tentang kewargaan. Elit yang dimaksud adalah birokrat pemerintahan dan kaum intelektual publik yang meninggalkan jejak baik dalam bentuk arsip pemerintah maupun tulisan dan pemberitaan di koran-koran. Berdasarkan pemikiran kaum elit, negara merdeka Indonesia dibayangkan berisi warga negara yang menghidupi satu standar nilai moralitas yang diimbangi oleh ikatan sosial yang kuat. Seperti diuraikan dalam dokumen-dokumen Departemen Pendidikan Masyarakat tahun 1953, bahwa setiap warga negara Indonesia, sebagai anggota bangsa, harus memiliki keseimbangan antara dimensi rasa yang sifatnya ke dalam dan ke luar. Dimensi rasa yang ke dalam itu meliputi kehidupan keagamaan dan kemanusiaan. Dimensi rasa yang ke luar mencakup nasionalisme, kedaulatan, dan kesejahteraan sosial. Menurut paparan Departemen Pendidikan Masyarakat (1953:4), warga negara Indonesia secara keseluruhan harus hidup dalam kolektivisme bersama sehingga mereka menjadi bangsa yang kuat. Dengan warga negara yang oleh kalangan elit dibayangkan memiliki karakteristik ideal itu, Indonesia akan memasuki komunitas internasional dengan posisi sebagai anggota yang merdeka dan berdaulat, setara dengan negara-bangsa lainnya (Departemen Penerangan, 1950: 6-7).

Kaum elit negara pada tahun 1950-an menilai dan beranggapan bahwa massa rakyat Indonesia buta ideologi. Sebuah dokumen pemerintah tahun 1953 menyatakan bahwa kebanyakan rakyat Indonesia tidak tahu arti menjadi satu bangsa dan menjadi warga dari sebuah negara modern merdeka. Mereka selama berabad-abad telah hidup sebagai hamba dalam pola kawula-Gusti (Arsip Muhammad Yamin No. 247:1, ANRI). Menurut kalangan elit pemerintah, rakyat yang

seharusnya menjadi warga negara Indonesia merdeka adalah rakyat yang percaya pada kemampuan sendiri, penuh motivasi dan gelora dengan semangat untuk kemajuan dan cita-cita hidup bersama (Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan 1951: 6).

Sebuah dokumen lain pada periode itu menyatakan bahwa cara dan proses berpikir massa rakyat, yang diwarisi dari tradisi kuno kolonial, harus diubah dan diperbaiki (Departemen Pendidikan Masyarakat, 1953: 11). Para elit Negara bermaksud menstimulasi kesadaran rakyat tentang status mereka sebagai warga negara (Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan 1951: 8). Proyek negara ini dirumuskan dengan dua kata kunci, yaitu persatuan dan *auto-activiteit* (prakarsa) (Departemen Pendidikan Masyarakat 1953: 7, 11-12). Melalui program-program untuk menggalakkan persatuan dan prakarsa warga, para elit negara menebarkan konsep kewargaan menurut perspektif mereka untuk dihidupi dan dilaksanakan oleh rakyat.

Masalah terbesar yang muncul dari penggambaran massa-rakyat tahun 1950-an, sebagai tidak berdaya dan tidak tahu apa-apa tentang makna menjadi warga negara, adalah berkembangnya hegemoni narasi negara tentang kewargaan. Dengan penggambaran rakyat sebagai pasif itu, negara yang diwakili oleh elit-elit pemerintah menampilkan diri sebagai rujukan tunggal pemaknaan atas makna menjadi Indonesia. Seluruh aktivitas rakyat diarahkan dalam bingkai idealisme pembentukan negara.

Fakta menunjukkan bahwa banyak dari aktivitas bidang-bidang tersebut telah dijalankan oleh warga masyarakat di berbagai lapisan masyarakat sebelum ada program-program pemerintah, misalnya

praktik kewargaan budaya pada awal abad keduapuluh sebagaimana ditunjukkan oleh Nordholt (2011). Karena itu, kebijakan pemerintah menempatkan program-program untuk menggerakkan massa-rakyat itu tampak sebagai upaya negara menyusup ke dalam kehidupan warga. Melalui proses ini, batasan dan konsep kewargaan yang telah dipraktikkan oleh rakyat dihegemoni oleh narasi dan wacana negara tentang apa artinya menjadi warga, yang mengabaikan fakta-fakta tentang praktik kewargaan rakyat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Bentuk-bentuk Praktik Kewargaan Tahun 1950-an

Praktik kewargaan pada 1950-an secara sosial mewujud dalam berbagai bentuk. Secara sosial maksudnya bahwa bentuk-bentuk kewargaan tersebut berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat dalam kehidupan kolektif mereka sehari-hari. Dari klasifikasi berita di berbagai surat kabar periode tersebut, diperoleh empat bentuk besar partisipasi warga dalam kehidupan masyarakat. Keempat bentuk kewargaan itu adalah (1). Aktivitas untuk penguatan identitas kebangsaan, (2). Filantropisme sebagai jaring pengaman sosial, (3). Perkumpulan sebagai wadah kewargaan, dan (4). Gugatan rakyat sebagai kontrol. Setiap bentuk kewargaan memuat unsur-unsur substansi peristiwa konkrit yang dalam artikel ini dinarasikan secara semi verbatim, artinya menurut versi asli yang tertulis di koran. Karena dirangkai dari berita-berita surat kabar yang sifatnya terpisah, peristiwa-peristiwa tersebut jika dibaca sendiri-sendiri tampak seperti kumpulan peristiwa terserak. Namun jika dibaca secara bersama-sama, aneka peristiwa yang diklasifikasikan tematik tersebut menciptakan makna kewargaan.

Di era 1950-an partisipasi masyarakat hadir dalam bentuk kegiatan yang dibuat atas inisiatif masyarakat dengan sedikit atau tanpa keterlibatan pemerintah. Muncul dan berkembangnya kelompok-kelompok sosial di desa-desa, di era 1950-an, menurut pemberitaan dari surat kabar *Pemandangan* merupakan kesadaran empatik masyarakat yang mulai tumbuh di dalam kehidupan masyarakat (*Pemandangan* 11 Desember 1956). Kesadaran yang hadir dalam masyarakat ini pun mendapat respon dari pemerintah dengan cara beragam. Kegiatan yang melibatkan pemerintah biasanya dilakukan secara kelompok dan menjadi fenomena di berbagai wilayah. Pada bagian ini, akan dipaparkan bentuk-bentuk kewargaan tahun 1950an dengan uraian tentang detil peristiwa-peristiwanya.

Pertama, aktivitas untuk penguatan identitas kebangsaan. Masa awal kemerdekaan Indonesia merupakan masa ketika pembentukan identitas kebangsaan menempati posisi utama dalam daftar isu-isu publik. Upaya untuk menguatkan identitas kebangsaan ditempuh melalui tiga cara, yaitu (1). Melalui kebijakan dan program-program pemerintah, yang tidak akan diulas dalam artikel ini karena sifatnya yang formal dan bukan keseharian; (2). Melalui penyampaian wacana kebangsaan di depan publik rakyat oleh golongan elit; (3). Melalui kegiatan yang menasar kelompok sosial tertentu di masyarakat.

Harian *Sin Po*, misalnya, memberitakan pernyataan pemimpin umum Partai Sosialis Indonesia (PSI), Sutan Sjahrir, mengenai solidaritas di antara negara-negara bekas jajahan. Dalam pernyataan yang disampaikan pada pembukaan kongres PSI itu, Sutan Sjahrir menyinggung tentang Konferensi Asia Afrika (KAA) yang menjadi simbol solidaritas global

negara-negara bekas jajajahan yang baru saja merdeka, khususnya di wilayah Asia dan Afrika. Menurut Sjahrir, solidaritas global itu dibutuhkan karena dalam usaha perjuangan, [melalui] kerjasama dengan organisasi demokratis yang progresif di dalam dan luar negeri, istimewa di negara-negara yang menuntut kemerdekaan dan kedaulatannya untuk merupakan suatu faktorimbangan dalam percaturan politik internasional (*Sin Po*, 8 Juni 1955: 11). Sebagai bangsa merdeka, kata Sjahrir, bangsa Indonesia dalam kebersamaan dengan bangsa-bangsa lain harus memelopori pembangunan di Asia kepada Asia dan Afrika yang maju dan makmur (*Sin Po*, 8 Juni 1955: 11) Pernyataan Sjahrir menguatkan kebanggaan kolektif sebagai bangsa merdeka, yang tidak berdiri sendiri tetapi ada bersama dengan bangsa-bangsa lain yang juga baru saja merdeka dari penjajahan.

Upaya membangun kesadaran kolektif sebagai bangsa yang merdeka juga dilakukan antara lain dengan menegaskan kembali semangat revolusi. Panglima Kodam III/17 Agustus, Kolonel Soerjosoempeno, dikutip *Harian Rakjat* mengatakan bahwa revolusi kita bukanlah revolusi tentara dan pemuda tetapi adalah revolusi kita bersama. Justru karena itu jika ada seseorang anggota tentara atau lainnya yang mengaku berjiwa pemuda, dan berlagak seakan-akan golongan dialah yang benar-benar berevolusi sedangkan yang lain tidak, maka mereka tersebut harus di-*retul* (*Harian Rakjat*, 15 Desember 1957: II). Apa yang disampaikan Soerjosoempeno mengangkat kembali wacana kebangsaan sebagai hasil perjuangan fisik, yang maknanya di tahun 1950-an dialihkan ke dalam sikap mental, yaitu mau berubah secara mendalam (revolusioner). Point lain yang ditekankan adalah bahwa perubahan sikap mental itu adalah perkara kolektif, persatuan

antara tentara, pemuda dan seluruh elemen masyarakat. Sikap mental revolusioner yang kolektif adalah wacana yang dilontarkan untuk menjadi ciri identitas kebangsaan periode itu.

Selain melalui penyebaran wacana oleh kaum elit, upaya memperkuat identitas kebangsaan juga berlangsung melalui kegiatan-kegiatan yang langsung menyasar kelompok sosial tertentu. Koran *Harian Umum* memberitakan bahwa di Madura diadakan kursus Bahasa Indonesia dan kursus pelajaran pengetahuan umum. Kursus diberikan oleh Pahlan, Kepala Sekolah Rakyat II yang dibantu Guru Bantu di sekolah tersebut, atas inisiatif sang kepala sekolah. Peserta kursus berjumlah 20 orang warga, di antaranya terdapat Kepala Desa. Di akhir berita tentang kursus ini, *Harian Umum* menulis, semoga tauladan yang baik ini dapat ditiru oleh lain-lain desa, demi kepentingan masyarakat (*Harian Umum* 2 November 1951).

Masih di Madura, atas usulan rakyat, Jawatan Pertanian Rakyat Kabupaten Pamekasan pada tanggal 21 November 1951 mengadakan kursus kader wanita tani di desa Sepaan, Pamekasan. Kursus diikuti oleh sebanyak 30 orang. Peserta adalah mereka yang telah menyelesaikan kursus pemberantasan buta huru. Kursus berlangsung selama 6 bulan (*Harian Umum* 26 November 1951).

Harian Umum juga memberitakan diadakannya kursus penerangan kewarganegaraan di Rumah Penjara Kalisosok, Surabaya. Kursus diadakan Jumat 14 Desember 1951 atas permintaan direktur Rumah Penjara Kalisosok kepada kantor urusan bangsa asing di Kota Besar Surabaya. Peserta kursus kewarganegaraan meliputi para hukuman Indo Blanda, Tionghoa, Arab dan lain-lain. Menurut berita tersebut, kursus

kewarganegaraan diselenggarakan agar mereka di penjara mengerti tentang kewarganegaraan dan juga mendapat kewarganegaraan menurut kehendak sendiri. Tujuan tersebut tampaknya tercapai. Buktinya, penerangan tersebut mendapat perhatian sepenuhnya ternyata dari pertanyaan yang disampaikan kepada pembicara. Segala pertanyaan yang diajukan oleh pembicara dijawab dengan memuaskan (*Harian Umum*, 17 Desember 1951).

Contoh lain adalah pengiriman tenaga pengajar untuk Lembaga Sosial Tingkat Kabupaten. Calon tenaga pengajar dikirimkan untuk mengikuti kursus yang diadakan dengan tujuan memperkuat sukarelawan dan sukarelawati kelompok-kelompok dan lembaga sosial di desa-desa. Biaya penyelenggaraan kursus tersebut berasal dari masyarakat. Di daerah Garut, rakyat dari Kecamatan Tjisompet dan Leles di tahun 1956 menyelenggarakan kegiatan sosial mereka dengan biaya sendiri (*Pemandangan*, 11 Desember 1956).

Peristiwa-peristiwa yang telah diuraikan menunjukkan keterlibatan dan kerjasama antara pemerintah dengan warga dalam upaya memperkuat identitas kebangsaan. Di sana ada wacana yang dimaksudkan sebagai konsep pedoman perilaku. Di sisi lain ada wujud konkrit, yaitu kursus bahasa Indonesia dan kursus kebangsaan, yang tujuannya untuk menguatkan pemahaman rakyat atas identitas kewargaan mereka di dalam alam baru, yaitu alam Indonesia merdeka. Praktik penguatan identitas kebangsaan di tahun 1950an ini masih tetap dilakukan hingga sekarang. Studi oleh Raharjo dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penguatan *civic literacy* memainkan peran penting dalam membentuk ketahanan sebagai warga negara yang baik di antara generasi muda saat ini (Raharjo dkk. 2017).

Baik dulu maupun sekarang, upaya-upaya untuk memperkuat identitas dalam berbagai cara itu menjadi pilar penting terbentuknya ketahanan sosial masyarakat di bidang ideologi kebangsaan dan visi bersama sebagai warga bangsa.

Kedua, filantropisme sebagai jaring pengaman sosial. Tindakan-tindakan filantropis, yaitu kesediaan bederma dan berbagi untuk kesejahteraan dan kebaikan orang lain dan komunitas, sangat menonjol di tahun 1950-an. Kita tahu bahwa di masa awal kemerdekaan itu keadaan serba sulit dalam berbagai hal. Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran dan tidak mampu memenuhi program-program kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, sebagian besar rakyat dalam keadaan miskin dan buta huruf, sebagian lain menganggur akibat sempitnya lapangan kerja. Di tengah situasi demikian, yang pantas dicatat, semangat kebersamaan warga justru sangat menonjol. Hal ini dibuktikan dalam pemberitaan tentang berupa-rupe kegiatan sosial untuk saling membantu. Kami mengidentifikasi empat kelompok bentuk tindakan saling-membantu yang ditunjukkan oleh warga masyarakat di tahun 1950an, yaitu kitanan anak yatim piatu, penggalangan dana sosial, bantuan kelompok politik, dan kerja bakti. Di bawah ini adalah uraian selengkapnya.

(1). Khitanan anak yatim piatu. Respon dari lembaga pemerintah terhadap munculnya kegiatan sosial masyarakat juga meliputi kegiatan yang sifatnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh lembaga sosial dan lembaga kesehatan bersama masyarakat Desa Kota Kaler K.K Sukabumi. Masyarakat Rukun Kampung Kaler, Sukabumi bersama para demawan dan Lembaga Sosial Desa (LSD)

Kaler K.K Sukabumi, pada tanggal 2 November 1956, melangsungkan kegiatan khitanan 9 anak yatim piatu yang bertempat di masjid Dj'mi Sriwedari (*Suara Masjarakat*, 10 November 1956). Acara tersebut juga mendapat sokongan dari Jawatan Sosial berupa uang Rp 320 dan pakaian sedangkan dari Jawatan Kesehatan berupa obat-obatan. Masing-masing anak yang disunat mendapat Rp. 25 dari dermawan. Penyelenggara acara ini adalah H. Tojib dan H. Abdulsjukur (*Suara Masjarakat*, 10 November 1956).

Gambar 1
Penyelenggaraan Khitanan Massal



Sumber : *Suara Masjarakat*, 10 November 1956

Khitanan umum juga dilakukan di daerah Jagalan, Jawa Tengah. Sebanyak 13 orang anak telah dikhitan atas usaha Panitia Khitanan yang diketuai oleh Rahardjo dengan dibantu beberapa orang. Biaya untuk keperluan tersebut adalah Rp 708,- diperoleh dari para peminat dalam kelompok-kelompok Rukun Kampung di lingkungan itu. Juga dukun khitan Abdulsamat dari Polak Wonoredjo telah menyumbangkan tenaganya secara cuma-cuma, demikian ditulis surat kabar. Mereka yang dikhitan di bawah pengawasan panitia dan seorang mantri selama masa penyembuhan (*Suara Masjarakat* 16 September 1952).

Selama tiga hari, yaitu 16-18 Agustus 1952 di Asrama Rakyat telah diselenggarakan 37 pernikahan dan 17 khitan anak yatim. Masyarakat menyambut antusias acara ini. Pernikahan massal menurut Panitia Asrama Rakyat sebagai penyelenggara, merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah wanita yang kurang terpelihara sehingga kemungkaran dan penyakit demoralisasi akan dapat dikurangi (*Suara Masjarakat*, 20 Agustus 1952).

(2). Penggalangan dana sosial. Pengumpulan dana untuk bantuan sosial pada tahun 1950an dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk oleh anak-anak sekolah. Contohnya, murid-murid Sekolah Rakyat di daerah Kabupaten Probolingga melakukan gerakan pengumpulan sumbangan bagi korban angin puyuh di Banyuwangi dan berhasil mengumpulkan uang Rp 1.227,50,- (*Pemandangan*, 23 Februari 1957). Tindakan ini menunjukkan bahwa upaya menumbuhkan kepedulian sosial telah dilakukan sejak dini di kalangan masyarakat saat itu.

Meskipun demikian, penggalangan dana untuk kegiatan sosial pada tahun 1950-an tidak hanya dilakukan dengan cara mengumpulkan bantuan-bantuan individu atau organisasi secara langsung. Dana kepedulian sosial juga dikumpulkan dengan cara mengadakan pasar malam, pertunjukan dan pameran. Sebagai contoh, diadakan bazar makan internasional di Jakarta pada 13 November 1956 (*Pemandangan*, 14 November 1956). Pertunjukan yang diadakan meliputi tari ballet, diprakarsai oleh Chairul Saleh. Tujuan pertunjukan tari ballet adalah untuk membantu Penyaluran Tenaga Bekas Anggota Laskar Rakyat, yaitu sokongan untuk janda-janda dan anak yatim piatu yang ditinggalkan anggota laskar rakyat khususnya di wilayah Jawa

Barat. Acara diadakan di Gedung Olahraga Jakarta, dengan penari balerina Indonesia Tjiok San Fang dan Salders Wells (Inggris). Acara juga dimeriahkan dengan lagu-lagu seriosa penyanyi radio Rose Sumabrata yang diiringi oleh komponis Sudarnoto serta violis Idris Sardi (*Pemandangan*, 8 Nov 1956).

Pertunjukan lain untuk sumbangan sosial misalnya dilakukan oleh Chung Lien Hui cabang Solo mengadakan sandiwara di Gedung Wayang Orang Sri Werdari dengan tema *The Broken Jade*. Hasil pengumpulan dana disumbangkan kepada Poliklinik Tsi Sheng Yuan (*Suara Masyarakat*, 9 Agustus 1952). Sementara itu, Lembaga Kebudayaan Melayu Cabang Jakarta mengadakan Malam Kuala-Deli bertempat di Gedung Kesenian, 27 Desember 1956. Hasil dari pertunjukan sebesar Rp 9.000,- kemudian oleh wakil dari mereka, yaitu Hamidy T. Djamil dan Abu Bakar, diserahkan ke Menteri Sosial Jakarta sebagai sumbangan untuk korban bencana alam di Sumatera Timur (*Pemandangan*, 15 Februari 1957).

Tanggal 31 Oktober sampai 2 November 1956 di Gedung Ang Hing Hoo Kota Lama Surabaya, ditampilkan sandiwara dengan lakon *Äku Bertobat*, gubahan Kwee Hwie Kien. Hasil pertunjukan digunakan untuk bantuan sosial. Lakon tersebut pernah ditampilkan di Porong dan mendapat perhatian besar sekali, dengan penghasilan Rp 30.000,- (*Suara Masyarakat*, 16 Oktober 1952).

Acara pertunjukan untuk penggalangan dana ini juga melibatkan anak-anak, seperti Pertunjukan Malang Kiddies. Dengan kostum yang dilengkapi dengan sayap dan properti lainnya nampak anak-anak usia 5–6 tahun terlibat dalam pertunjukan tersebut. Mereka pentas tanggal 20, 23, dan 24 November 1956 bertempat di SMA Negeri 1 Aloonbunder,

Malang. Hasil pertunjukan tersebut untuk Pendidikan Kerohanian dan Pembangunan Gedung Pastori Tiong Hoa Kie To Kauw Hwee (*Suara Masyarakat*, 18 September 1952).

Meskipun demikian, tidak semua pertunjukan untuk acara sosial sukses. Misalnya, rombongan tari Bali yang mengadakan pertunjukan untuk amal di Kota Bogor selama dua malam hanya mampu mengumpulkan Rp 3.730,-. Dengan harga karcis Rp 25,- dan Rp 15,- banyak kursi penonton tetap kosong (*Suara Masyarakat*, 10 Januari 1957). Pertunjukan yang diadakan dalam rangka perayaan Natal sekolah Minggu HKBP sektor Menteng Baru berupa sandiwara dan koor juga bermuatan sosial dengan hasil akan diberikan pada pembangunan Gereja HKBP Jakarta Raya. Pertunjukan ini juga menghimpun sedikit saja dana (*Suara Masyarakat*, 21 Desember 1956).

Selain pertunjukan ada pula kegiatan sosial pengumpulan dana yang dilakukan dengan cara mengadakan sayembara/perlombaan. Sebagai contoh adalah sayembara pakaian berpepet yang diadakan di Grand Hotel yang diikuti oleh golongan Tionghoa, Eropa dan Indonesia. Hasil dari kejuaraan sebesar Rp 24.000,- diserahkan untuk membantu Panitia Persiapan PON III di Medan (*Suara Masyarakat*, 18 September 1952).

Kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat ini memiliki kegiatan yang beragam. Sebagai contoh sekelompok orang di Kota Bogor selama kurang lebih 10 hari di bulan Desember 1956 (dimulai 10 September) melakukan gerakan sosial berupa pengumpulan uang, beras, dan pakaian. Kegiatan tersebut menghasilkan uang sebesar Rp 11.939,15,- dan pakaian sebanyak 5.012 potong serta beras 75 kg. Hasil tersebut dibagikan kepada yang membutuhkan baik yang dianggap

tidak mampu maupun korban bencana dan anak-anak yatim/piatu (*Pemandangan*, 27 Desember 1956). Sementara itu di Yogyakarta Lembaga Sosial Desa melibatkan 250 pemuda-pemudi desa, melakukan penanaman kopi di lereng-lereng gunung yang tidak lagi ditanami oleh pemilik tanah termasuk tanah desa (*Pemandangan*, 1 November 1956).

(3). Bantuan kelompok politik. Kegiatan sosial juga menjadi bagian dari program organisasi politik berbasis agama, seperti NU, Muhammadiyah dan Masyumi. Bentuk kegiatan bisa saja sama dengan kegiatan yang diselenggarakan kelompok-kelompok lain. Namun fakta bahwa pihak penyelenggara membawa identitas ideologi memberi pesan dan makna berbeda terhadap substansi kegiatan yang diselenggarakan. Misalnya, di Kota Sidoarjo pada tanggal 27 Oktober 1952 dibuka Pasar Malam selama 15 hari. Selain sebagai kegiatan yang bersifat sosial, kegiatan serupa ini bermuatan politik. Makna ini menjadi kuat tatkala Organisasi Masjumi Anak Cabang Gambir, Jakarta Pusat juga melakukan kegiatan sosial pada 7 Oktober 1956 jam 16.20 bertempat di Madrasah Jalan Tenggulun dengan membagi-bagikan sejumlah uang yang besarnya untuk setiap orang Rp 75,- dan pakaian (satu bungkus) pada korban bencana kebakaran di Kampung Menteng, Sukabumi. Pemberian bantuan utamanya dilakukan pada anggota-anggota dan simpatisan partai (*Pemandangan*, 8 Oktober 1956).

Kegiatan bernuansa keagamaan sehari-hari masyarakat yang berskala temporer, misalnya Idul Adha dan Idul Fitri, juga tak luput dari sasaran propaganda partai politik. Umat Muslim melakukan salat berjamaah di lapangan dengan partai-partai keagamaan menggunakan kesempatan itu

untuk kegiatan sosial. Misalnya, NU Surabaya mengadakan acara kitanan untuk fakir miskin dan membagikan sarung dan baju usai salat Idul Adha di Masjid Kemayoran (*Suara Masjarakat*, 2 September 1952).

Kegiatan khitanan usai salat Idul Adha di tahun 1952 juga diadakan di beberapa ranting NU (Mojoagung, Gayam, Perak dan Balungrejo, dengan total jumlah anak yang disunat 126 orang (*Suara Masjarakat*, 9 September 1952). Saleh Said, seorang penulis dalam surat kabar *Suara Masyarakat*, melihat bahwa kegiatan kitanan usai salat Idul Adha memiliki makna kesetaraan. Untuk menegaskan makna kesetaraan itu, Saleh Said di dalam tulisannya menggunakan istilah duduk sama rendah berdiri sama tinggi (*Suara Masjarakat*, 30 Agustus 1952).

Kegiatan lain yang bersifat sosial misalnya pengumpulan zakat, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah Blitar dengan mengumpulkan beras sebanyak 1.413.590 kg dan dibagikan kepada 1910 orang fakir miskin (*Suara Masjarakat*, 10 Juli 1952). Menurut pemberitaan *Suara Masjarakat*, pada tahun 1952 organisasi-organisasi keagamaan sering melakukan kegiatan sosial pemeliharaan anak yatim-piatu. NU misalnya telah memelihara 40 anak dan Muhammadiyah 40 anak (*Suara Masjarakat*, 9 September 1952).

Penggalangan dana sosial oleh kelompok politik secara jelas menunjukkan motif-motif pamrih politik. Artinya, kegiatan jenis ini dilakukan oleh pihak-pihak tersebut untuk memperoleh keuntungan tertentu. Karena itu, jenis kegiatan oleh kelompok politik ini, meskipun secara substantif ditujukan untuk membantu rakyat yang membutuhkan, tidak dapat dikategorikan sepenuhnya sebagai tindakan filantropis. Meskipun demikian, penggalangan dana sosial oleh kelompok

Gambar 2
Pembagian sarung dan acara pertunjukan untuk pengumpulan dana
(kiri ke kanan)



Sumber: *Suara Masyarakat*, 10 Juli & 9 September 1952; *Pemandangan*, 8 Oktober 1956

politik tetap mencerminkan kepedulian dan keterlibatan kelompok tersebut di tengah perkembangan masyarakat. Jadi, kegiatan ini memiliki agenda tersembunyi namun secara pragmatis merupakan bentuk partisipasi kewargaan yang juga patut dicatat sebagai salah satu ciri periode 1950-an.

(4). Kerja bakti. Kegiatan-kegiatan bernuansa sosial yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif dengan hasil berupa bangunan fisik biasanya nampak pada kegiatan-kegiatan gotong-royong/kerjabakti. Kegiatan masyarakat yang bersifat sosial dilakukan atas inisiatif individu dalam bentuk pembangunan fisik/infrastruktur. Pembangunan infrastruktur fisik pada umumnya dilakukan melalui kerja bakti, yaitu iuran tenaga dari penduduk lelaki dewasa, Meskipun demikian, ada juga penduduk berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti pembangunan infrastuktur itu dengan cara menyumbangkan uang. Misalnya yang dilakukan oleh Baruddin DT Bagindo (Direktur N.V. Perdagangan dan Perindustrian B. DT. Bagindo (B.D.B). Ia menyumbangkan uang sebanyak Rp 250.000 untuk mendirikan gedung

sekolah di Sumatera Tengah (*Suara Masyarakat*, 5 Oktober 1956). Sementara itu, Siang Lian Hwee dari Pusat Perdagangan Tionghoa di Jakarta dengan perantara Tjong Hwa Siang Hwee di Malang telah mengirimkan uang sejumlah Rp 10.000,- untuk disumbangkan ke Rumah Sakit Tionghoa Le Sia di Malang (*Suara Masyarakat*, 25 Agustus 1952). Di daerah Kaligondo Kecamatan Genteng Banyuwangi, misalnya, masyarakat secara swadaya membangun sekolah partikelir yang kemudian diberi nama Pamardi Putera (*Suara Masyarakat*, 28 Agustus 1952). K. Abd Manan, seorang guru Pelajaran Agama pada Sekolah Rakyat VI di Kecamatan Batu Putih, Madura memprakarsai diadakannya pertemuan antara wakil-wakil jawatan organisasi dan pemuda rakyat di Kecamatan Sumenep. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membangun Madrasah Partikelir karena masih banyak rakyat yang dianggap dangkal dalam pengetahuan agama (*Suara Masyarakat*, 12 November 1952).

Kegiatan serupa, yaitu pembangunan gedung dengan bantuan pendanaan dari para pedagang, dilakukan di Kecamatan Winongan,

Jawa Timur. Pembangunan gedung selesai dengan biaya sekitar Rp 10.000,- (*Suara Masyarakat*, 20 Agustus 1952). Di Desa Balak (Singojuruh), Banyuwangi, rakyat setempat mendirikan sebuah rumah sekolah dengan biaya Rp 50.000,- Biaya sebesar itu dikumpulkan dari orang-orang tani yang tiap hektarnya dipungut Rp 26,-, dari para pedagang besar yang dipungut Rp 50,- dan dari pedagang kecil Rp 10,- (*Suara Masyarakat*, 12 September 1952).

Di Kampung Palasarigirang Klapanunggal, Jawa Barat pada tahun 1956, masyarakat di tempat tersebut membangun masjid dengan ukuran 8 x 16 meter, dengan biaya Rp 25.000,- yang kemudian dinamai Masjid 17 Agustus (*Pemandangan* 22 Desember 1956). Di tahun yang sama, kurang lebih sebanyak 100 orang di Sukabumi tepatnya di wilayah Klapanunggal melakukan perbaikan selokan-selokan sepanjang 4 km untuk pengairan sawah dan kolam (*Pemandangan*, 22 November 1956). Pembangunan irigasi juga dilakukan penduduk di Kecamatan Bayongbong (*Pemandangan*, 11 Desember 1956).

Contoh lain, di daerah Lengkong, Jember, Jawa Timur, penduduk melakukan perbaikan gedung sekolah yang rusak dengan biaya Rp 11.807,55,- (*Pemandangan* 8 November 1956). Kegiatan kerjabakti membangun bangunan fisik dengan dana swadaya masyarakat seperti ini di era tahun 1952-an juga dilakukan di Banyuwangi. Warga setempat membangun tiga jembatan dan satu dam pengairan dengan menghabiskan biaya sejumlah Rp 25.000,- (*Suara Masyarakat*, 23 Agustus 1952). Gotong-royong yang dilakukan oleh masyarakat pada situasi lain juga menjadi upaya terstruktur seperti yang terjadi di daerah Sumenep, Desa Talngu dan

Padike Ketajamatan Keliangget. Penduduk di sana melakukan perbaikan jalan desa-desa sepanjang 1 km atas anjuran Asisten Wadana setempat (*Suara Masyarakat*, 18 Agustus 1952).

Atas inisiatif dari Pemuda Rakyat ranting Taruma-Jaya di Klitren Lor, telah dapat dikumpulkan uang sumbangan dari penduduk RK Klitren Lor sebanyak lebih kurang Rp 200 guna disumbangkan kepada penduduk Ledok Balapan (RK Klitren Lor) meringankan penderitaan mereka yang rumahnya rusak akibat banjir pada waktu yang lalu. Kemudian pada tanggal 6/2 Pemuda Rakyat tersebut bersama-sama dengan Bagian Sosial RK Klitren Lor dan Jawatan Penerangan Gondokusuman telah memperbaiki tanggul yang rusak akibat banjir tersebut secara gotong royong (*Kedaulatan Rakyat*, 8 Februari 1955: 2).

Secara bersama-sama, keempat bentuk tindakan filantropis tersebut, yaitu kitanan anak yatim piatu, penggalangan dana sosial, bantuan kelompok politik, dan kerja bakti, membentuk jaring pengaman sosial warga menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan masyarakat tahun 1950-an. Ketika negara tidak atau belum mampu memenuhi kewajibannya dalam menyejahterakan rakyat, maka rakyat dengan kesadaran kolektifnya telah menjalankan usaha-usaha swadaya untuk kesejahteraan. Yang penting dicatat di sini bukan pertamanya berhasil/tidaknya usaha oleh rakyat, juga bukan besar/kecilnya skala usaha tersebut. Yang penting dicatat di sini adalah kesadaran kolektif, rasa persatuan dan kepekaan yang berkembang di tengah masyarakat terhadap persoalan yang sedang terjadi. Di sana ada kepedulian dan tindakan konkrit keterlibatan warga. Secara keseluruhan, kepedulian dan keterlibatan dalam hal ini menguatkan sosial dan ketahanan sosial warga itu sendiri.

Ketiga, perkumpulan sebagai wadah kewargaan. Perkumpulan telah menjadi model baru gerakan massa di Hindia Belanda/Indonesia sejak awal abad kedua puluh. Perkumpulan itu kebanyakan diinisiasi dan dijalankan oleh kaum terpelajar. Pada tahun 1950-an, yaitu setelah Indonesia merdeka, perkumpulan sebagai wadah kewargaan tetap sangat banyak jumlahnya di kalangan pemuda dan pelajar. Namun, bedanya, pada tahun 1950-an terdapat berbagai macam perkumpulan dan organisasi kalangan yang bukan pelajar, misalnya ibu-ibu rumah tangga, warga kampung, dan petani. Lewat perkumpulan, warga berpartisipasi dalam merespons maupun mencari penyelesaian atas berbagai permasalahan. Perkumpulan menjadi wadah masyarakat untuk mewujudkan kewargaannya.

(1). Perkumpulan kelompok sosial. Salah satu organisasi masyarakat yang marak pada masa itu adalah pembentukan koperasi. Di Desa Padi Pulau Poterran dibentuk sebuah koperasi yang diberi nama Perkumpulan Koperasi Sidomulyo (*Suara Masjarakat*, 24 Oktober 1952). Tujuan dari koperasi tersebut adalah untuk perbaikan kehidupan rakyat. Di Tulung Agung Kecamatan Kras Desa Pelas didirikan sebuah koperasi yang dinamai Rukun Tani Mardi Gemi yang diketuai oleh Lasi. Anggota koperasi tersebut berjumlah 30 orang. Usahanya berupa pembelian gula, gabah dan lainnya di samping usaha memberikan pinjaman kepada petani yang membutuhkan (*Suara Masjarakat*, 20 Oktober 1952). Selain dalam bentuk koperasi, perkumpulan petani juga didirikan. Misalnya di daerah Pujon, juga di Tulung Agung, Jawa Timur. Mereka yang tergabung dalam persatuan ini dilarang menyewakan tanahnya kepada orang asing. Mereka yang melanggar aturan tersebut

maka tanah gogolnya akan dicabut. Persatuan ini juga mendapat bantuan dari Djawatan Pertanian Rakjat bagian Perkebunan berupa bibit konis, kentang, rabuk dan lainnya (*Suara Masjarakat*, 7 Oktober 1952).

Organisasi-organisasi dalam masyarakat ini juga terkait dengan persoalan keseharian dalam masyarakat, misalnya adanya kumpulan kematian. Kumpulan kematian tersebut berada di Lumajang dalam gabungan Rukun Tetangga dari daerah Papingan. Menariknya bahwa sistem yang dianut oleh perkumpulan kematian ini cukup unik yaitu tidak semata-mata dengan menarik iuran dari anggota tetapi mencari tambahan uang kas dengan cara lain. Cara yang dilakukan adalah dengan semacam denda jaga malam. Tiap-tap RT mempunyai jadwal jaga malam, dan apabila tidak dapat terwakili dalam jadwal jaga malam, maka yang bersangkutan terkena denda Rp 3,-. Uang denda tersebut dikumpulkan untuk membeli payung buat orang mati, cangkir dan peralatan lain buat keluarga yang berduka. Selain itu keluarga yang berduka juga diberi "uang menderita" akibat kematian anggota keluarga sebanyak Rp 25. Tiap-tiap penduduk dalam gabungan Papingan tersebut ditarik uang, setengah dari hasilnya dimasukkan ke dalam kas.

Selain itu di Adiwarna daerah Kabupaten Tegal dibentuk organisasi kebatinan baru *Kawruh Luguning Talutung Tri* oleh Kyai Gede Anwar Tjokro Abdullah dari Brebes. Organisasi yang memiliki simbol berbentuk segitiga dengan lukisan keris dan bintang di dalamnya ini belum memiliki anggota terlalu banyak. Tujuan dari didirikannya organisasi ini adalah untuk mempersatukan jiwa bangsa Indonesia lahir batin berdasarkan Merah Putih dan Pancasila, memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan cara kerohanian dan

mengadakan pendidikan dan mengadakan pendidikan jasmani rohani kepada pengikutnya ke arah kesempurnaan manusia.

Kaum petani tak mau ketinggalan. Pada tanggal 25 Oktober 1951, surat kabar *Harian Umum* memberitakan bahwa Persatuan Tani Nasional Indonesia (PETANI), yang Dewan Pimpinan Pusatnya berkedudukan di Madiun, akan mengadakan Kongresnya yang ke-2 di Semarang pada tanggal 9-11 Desember 1951. Di antara hal-hal yang akan dibicarakan adalah politik agraria, perkreditan dan badan hukum (*rechtspersoon*), Kader Tani, Wanita Tani dan menstabilkan organisasi (*Kedaulatan Rakjat*, 25 Oktober 1951).

Kaum buruh juga aktif. Sekretariat Bersama Buruh di Klaten memberikan pernyataan bahwa "sesuai keputusan kongres nasional SOBSI ke-2 di Solo, menyokong semua tindakan pemerintah untuk membasmi korupsi, baik di kalangan pemerintahan maupun di dunia partikelir. Perkumpulan ini menyatakan bersedia membela anggota-anggotanya yang tersangkut kasus korupsi PUK Klaten tetapi hanya terbatas pada hak-hak perikemanusiaan (*Kedaulatan Rakjat* 17 Februari 1955: 2).

Hadirnya perkumpulan perempuan seperti Yayasan Beribu, yang berkonsentrasi dalam pendidikan juga memberi warna tersendiri di era tersebut. Yayasan ini berada di Bandung dan diketuai oleh Nyonya Ema Puradiredja dengan Nyonya Saleh sebagai ketua Divisi Pengajaran. Yayasan Beribu memiliki program yang dikenal dengan sistem Saleh/Marsman yaitu sebuah cara mendidik agar anak menjadi kreatif, menjadi manusia hidup yang bisa mencipta. Yayasan ini memandang bahwa model atau metode kolonial dengan menumpuk pengetahuan sudah tidak cocok lagi. Sistem dari yayasan

ini juga disosialisasikan melalui lawatan, misalnya dengan kunjungan ke Malang pada 16 Agustus 1962.

Gambar 3
Nyonya Effendi Saleh Menjelaskan Tujuan Organisasi di Malang IPPOS



Sumber: *Suara Masjarakat*, 16 Agustus 1952

Yayasan beribu juga memiliki sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan ibu dalam mempraktekkan Sistem Saleh Matraman, dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan bahasa daerah (*Suara Masjarakat*, 16 Agustus 1952). Kelompok-kelompok yang hadir dalam kehidupan masyarakat lainnya kala itu seperti taman membaca model desa yang ada di Kabupaten Lumajang (*Suara Masjarakat*, 9 Agustus 1952).

Perkumpulan wanita juga didirikan di daerah Prambanan, wilayah Yogyakarta. Perkumpulan bernama Rukun Wanita Prambanan Kidul mengadakan rapat rutin bulana. Pada rapat hari Sabtu, tanggal 5 Februari 1955 di rumah Ny. Marguno Sorogedug, yang dihadiri oleh segenap anggotanya, disepakati bahwa perkumpulan tersebut akan

mengadakan peringatan satu tahun berdirinya. Peringatan hari lahir perkumpulan akan diadakan di rumah Ny. Priosudarmo Sonajan. Harian *Kedaulatan Rakjat* memberitakan bahwa dalam pertemuan tersebut selain menerima anjuran-anjuran dari Japen Kantor Prambanan dan Ketua Pendidikan Masyarakat tentang kewajiban wanita dalam masyarakat, juga diadakan pembagian uang tabung pinjam (*Kedaulatan Rakjat*, 8 Februari 1955: 2).

(2). Perkumpulan pemuda dan pelajar. Selain koperasi dan perkumpulan, juga marak didirikannya organisasi pemuda. Karena perkumpulan dan organisasi pemuda dan pelajar bukan fenomena baru pada tahun 1950-an, pada bagian ini hanya akan disajikan sekilas sejumlah kegiatan organisasi pemuda dan pelajar, sekedar sebagai gambaran betapa dinamisnya kehidupan masyarakat pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia.

Panitia Aksi Mahasiswa Surabaya, 18 Oktober 1952 berdiri dengan dokumen pendirian ditandatangani oleh ketua Jitno Soegardjo dan sekretaris panitia Tjemblek Poeger. Tujuan didirikan panitia aksi ini adalah untuk mempelajari perkembangan politik yang berhubungan dengan situasi di Jakarta (*Suara Masyarakat*, 21 Oktober 1952). Selain itu berdiri pula Ikatan Pelajar Pulau Sumbawa (IPPS) pada hari Minggu 10 Agustus 1952, yang diprakarsai oleh sekitar 50 orang (*Suara Masyarakat*, 12 Agustus 1952). Sebelum hadirnya organisasi yang diketuai oleh Abdul Mutalib ini mulanya telah ada organisasi Pengurus Nasib Pelajar Pulau Sumbawa, namun organisasi ini tidak berjalan (*Suara Masyarakat*, 12 Agustus 1952). Organisasi serupa misalnya adalah Ikatan Pemuda Peladjar Kalipare (IIPK) Panggang, Gunung Kidul, yang diketuai oleh Tukimin (*Suara Masyarakat*, 22 Juli 1952).

Pelajar sekolah lanjutan di Kediri membentuk Panitia Peringatan Hari Pelajar Sedunia, dengan ketua Sukamto dari Taman Guru. Tanggal 17 November 1951 diadakan rapat umum di alun-alun, dilanjutkan pawai, perlombaan olah-raga, dan malam resepsi dengan pertunjukan kesenian. Biaya penyelenggaraan acara ini diperoleh dengan jalan memungut jumlah tertentu dari pelajar di tiap-tiap sekolah, yaitu rata-rata 50 sen per orang, dan dengan mengumpulkan derma (*Harian Umum*, 16 November 1951).

Di Yogyakarta berdiri apa yang dinamai Panitia Persatuan Nasional, yang mengadakan peringatan Hari Kebangsaan Nasional, 20 Mei 1955. Selain dari itu Panitia Persatuan Nasional daerah Yogyakarta telah memutuskan juga untuk membentuk cabang-cabang dan ranting-ranting Panitia Persatuan Nasional sampai di kabupaten-kabupaten dan kapanewon-kapanewon (kecamatan) (*Kedaulatan Rakjat*, 14 Mei 1955: 2). Sementara itu Komite Perdamaian Dunia di Semarang, Jogja dan Solo menyelenggarakan Konferensi Perdamaian, sebagai kelanjutan hasil sidang Dewan Perdamaian Dunia di Vienna, konferensi Perdamaian se-Asia di New Delhi tanggal 6 sampai dengan April 1955 dan kongres Perdamaian sedunia di Helsinki (*Kedaulatan Rakjat*, 21 Februari 1955: 2). Kegiatan-kegiatan tersebut dipelopori oleh perkumpulan pemuda dan pelajar.

Keempat, rakyat menggugat sebagai wujud partisipasi sipil. Protes warga atas berbagai permasalahan sehari-hari merupakan indikator kesadaran warga tentang hak-hak sipilnya sebagai warga negara. Di tahun 1950-an, warga masyarakat di berbagai daerah menyampaikan ketidakpuasan dan tuntutan mereka atas berbagai persoalan itu melalui bermacam-macam saluran

ekspresi. Pemberitaan surat kabar secara rutin mengulas persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat dan bagaimana rakyat berusaha mengkomunikasikan persoalan tersebut kepada pemerintah. Dalam artikel ini kami membedakan jenis-jenis gugatan warga ke dalam dua kategori, yaitu kategori gugatan yang terkait dengan keseharian kebutuhan rakyat dan kategori gugatan dalam bingkai hubungan industrial antara buruh dan majikan. Kedua jenis gugatan warga ini dalam ranah yang berbeda menunjukkan kesadaran warga tentang posisinya dalam bingkai negara. Kasus-kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa penilaian para elit tentang ketidakberdayaan dan ketidaktahuan rakyat tentang statusnya sebagai warga negara di tahun 1950an, sungguh tidak berdasar dan tidak tepat.

(1). Keseharian dan kebutuhan rakyat. Kasus yang secara sangat jelas menunjukkan kesadaran hak-sipil warga adalah pernyataan terbuka berupa tuntutan penduduk Kricak, Yogyakarta agar diadakan aliran listrik ke wilayah mereka. Sebagaimana diberitakan *Harian Kedaulatan Rakjat*, penduduk Rukun Kampung Kricak, Tegalrejo Yogyakarta dalam rapatnya memutuskan mendesak kepada yang berwajib agar segera dilakukan pemasangan lampu listrik di dalam RK tersebut. Tuntutannya itu didasarkan atas dalam bulan puasa ini keamanan tiap-tiap kampung tambah terganggu sudah ada persetujuan dari DPD Kotapraja, dan persetujuan dari pihak Aninem Kotapraja (yang waktu itu belum dinasionalisir). Menurut berita tersebut, soal tuntutan itu pihak perusahaan listrik tidak berkeberatan asal ada persetujuan dari Walikota Yogyakarta. Persetujuan dari Walikota itu ditunggu juga oleh penduduk Kricak (*Kedaulatan Rakjat* 12 Mei 1955).

Protes juga dilancarkan oleh para pengusaha titipan sepeda di sekitar bioskop Rio, Klaten. Mereka menyampaikan protes tertulis kepada DPDS Kabupaten Klaten tentang penutupan usaha mereka itu oleh pemerintah daerah kabupaten. Dalam suratnya, para pengusaha titipan sepeda menanyakan dasar dan tujuan pemerintah menutup usaha mereka, yang pasti berdampak finansial. Menurut sumber lain yang diwawancarai *Harian Kedaulatan Rakjat*, pemerintah menetapkan bahwa titipan sepeda di tempat-tempat umum, seperti pasar dan bioskop, akan diusahakan sendiri oleh pemerintah. Untuk itu, pada 1955 pemerintah daerah telah mengadakan lelang umum. Untuk menjamin pemasukan pemerintah, harus ada lelangan tunggal, karena itu titipan sepeda tidak resmi harus ditutup (*Kedaulatan Rakyat* 17 Februari 1955: 2).

Sementara itu, rapat anggota Sarekat Pedagang Kecil Kota Malang daerah pasar malam tanggal 13 Juli 1952 telah mengambil keputusan untuk memajukan resolusi kepada yang berwajib agar pertama, perintah pengurusan pedagang dicabut dan diganti dengan komitmen untuk tidak merugikan kedua belah pihak, baik pemerintah dan pedagang kecil. Kedua, menuntut tempat-tempat berjualan yang strategis. Ketiga, menuntut supaya pemerintah Kotapradja memberi kerugian kepada para pedagang kecil yang tergusur karena rumah-rumah yang dibongkar itu adalah milik yang bersangkutan sendiri.

Ikatan Pedagang Kecil tersebut menyatakan bahwa ketentuan pengurusan ditinjau dari sudut ekonomi dan sosial berarti mematikan sumber penghasilan para pedagang kecil yang nantinya tentu akan membawa pengangguran dan kemelaratan.

Para pedagang menilai pemerintah Kotapraja Malang kurang bertanggung jawab atas pedagang-pedagang kecil yang telah dapat berjualan bergerombolan dan teratur di dalam halaman berkas kantor keresidenan itu. Sejak para pedagang kecil itu tidak diperkenalkan berjualan di alun-alun, mereka pindah berjualan di halaman bekas kantor karesidenan. Berhubung dengan pembangunan kembali kantor tersebut, para pedagang tidak lagi diijinkan berjualan di tempat itu (*Suara Masyarakat* 16 Juli 1952).

Suara rakyat tentang berbagai hal tersebut sebenarnya dilandasi oleh fakta tentang buruknya kondisi sosial ekonomi mereka saat itu. Kekhawatiran para pedagang kecil di Malang tentang kemungkinan terjadinya pengangguran dan kemiskinan lebih lanjut jika mereka tidak diijinkan berdagang di halaman kantor karesidenan, tampaknya beralasan. Seperti diberitakan Harian *Kedaulatan Rakjat*, di wilayah Kedu, Jawa Tengah ketika itu terjadi pengangguran besar yang menyebabkan kemiskinan parah.

Menurut Kepala Kantor Penempatan Tenaga Kerja daerah Kedu, jumlah pekerja yang mendaftar lewat kantornya untuk pergi bekerja di perkebunan karet Takengon di Sumatra pada tahun 1954 mencapai 565 keluarga terdiri dari 770 jiwa, 333 di antaranya berasal dari Kedu Selatan. Penganggur yang mendaftar ada 2.317 orang, termasuk 383 wanita. Penempatan: 236 orang, di antaranya 88 wanita. Tahun 1953 yang mendaftar 1.762 orang, termasuk 308 wanita, ditempatkan 265 terhitung 67 wanita. Dalam 1954 yang menganggur 555, sebagian besar keluaran Sekolah Rakyat yang tidak dapat meneruskan pelajarannya ke SMP. Selama 1954 dari penganggur yang mendaftarkan diri untuk penempatan kerja terdiri dari: 1227 keluaran SR (sekarang SD), 199 keluaran SMP dan 11

keluaran SMA dan mahasiswa, selebihnya buta huruf (*Kedaulatan Rakjat*, 17 Februari 1955: 2).

(2). Buruh berkeluh. Buruh di Hindia Belanda termasuk kelompok yang mengorganisasi diri dengan intensif sejak awal abad keduapuluh. Organisasi buruh menjadi penanda penting gerakan sosial pada masa kolonial. Pada masa Indonesia merdeka, organisasi buruh hadir sebagai elemen penting gerakan sosial kemasyarakatan yang terstruktur cukup rapi. Misalnya organisasi buruh seperti Persatuan Buruh Philips. Persatuan Buruh memiliki beberapa cabang seperti Cabang Jakarta dan Cabang Bandung, yang anggotanya sekitar 74 buruh (*Pemandangan*, 1 Oktober 1956). Struktur organisasi buruh terkait dengan hubungan industrial anggota-anggotanya. Isu-isu yang diangkat oleh dan dalam gerakan organisasi buruh hampir selalu berkaitan dengan isu kepegawaian dan tuntutan kesejahteraan kepada majikan. Karena sifat organisasinya terstruktur kuat dan isu-isu gerakannya terkait hal dasar kesejahteraan, gerakan organisasi buruh menjadi strategis secara politik. Pada tahun 1950-an, gerakan organisasi-organisasi buruh di Indonesia cenderung mengarah pada persinggungan dengan politik kekuasaan secara langsung.

Kasus peristiwa di Pamekasan, Madura menceritakan perselisihan antara Serikat Buruh Republik Indonesia (SBRI) dengan BAT (British American Tobacco), sebuah perusahaan rokok besar pada waktu itu. Pangkal perselisihan adalah pemecatan dua orang buruh BAT. Menurut pihak BAT, pemecatan dilakukan karena kedua orang buruh tidak cakap dan malas bekerja. Namun pihak SBRI membantah hal itu. Menurut SBRI, *background* dari pemecatan itu adalah karena kedua orang yang dipecat itu aktif bekerja untuk SBRI dan banyak memperjuangkan dan

melindungi nasib buruh. Untuk melumpuhkan gerakan-gerakan SBRI itu maka kedua orang tersebut yang menjadi pimpinan dalam SBRI telah dipecat dengan tuduhan yang dicari-cari. Yang disesalkan pihak SBRI, beberapa orang Indonesia yang bekerja pada BAT dan instansi yang mengurus soal perburuhan ada tanda-tanda turut berusaha untuk melumpuhkan SBRI di Pamekasan. BAT sendiri membantah argumen SBRI. BAT menjelaskan bahwa kedua orang buruh yang dipecat, telah mendapatkan kenaikan gaji sebanyak 3x walaupun belum genap 1 tahun bekerja. Penyelesaian atas masalah ini kemudian diserahkan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya (*Harian Umum*, 26 November 1951).

Dari Madiun dilaporkan oleh *Harian Umum*, bahwa Serikat Buruh Gula Komisariat Daerah IV yang meliputi 5 cabangnya dalam konferensi cabang pada tanggal 7 Desember 1951 mendesak kepada Administratur Pabrik Gula Sudiono supaya mengembalikan kaum buruh gula yang telah di-*ontslag* (dipecat) pada tanggal 1 Desember 1951 sebanyak 554 orang, serta membenarkan serta memperkuat pendapat Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Gula Sudhono, seperti yang termaktub dalam resolusinya tanggal 4 Desember 1951. Serikat Buruh Gula menyatakan bahwa pemecatan itu bersifat sewenang-wenang. Meskipun telah memberitahu lebih dahulu para buruh tentang rencana pemecatan, tetapi pihak perusahaan tidak mengajak berunding Serikat Buruh Gula yang menjadi wadah organisasi para buruh. *Massa-ontslag* (pemecatan masal) tersebut terang mengakibatkan pengangguran dan mungkin juga mengakibatkan terganggunya keamanan yang tak diinginkan oleh pemerintah (*Harian Umum* tanggal 17 Desember 1951).

Serikat Buruh Gula Madiun juga mengajukan protes kepada ASSI. Protes itu

terkait dengan keputusan kongres ASSI yang dianggap mengurangi hak-hak Kaum Buruh Gula yang telah ada. Serikat Buruh Gula mendesak ASSI untuk mencabut konsepsinya kembali dan membenarkan/menyokong pendirian DPP SBG untuk mempertahankan Perjanjian Perburuhan yang ditandatangani tanggal 22 Agustus 1951. Lebih jauh Serikat Buruh Gula menyatakan bahwa konsepsi ASSI yang disodorkan kepada delegasi SBG pada perundingan tanggal 20 Nov. 1951 nyata-nyata nilainya lebih rendah daripada perjanjian yang telah ada, sedang dari yang sudah ada itu belum seluruh fasalnya dilakukan oleh pihak majikan (*Harian Umum*, 17 Desember 1951).

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi kaum buruh dan masyarakat kecil menarik perhatian partai-partai politik tahun 1950-an. Isu-isu kesulitan itulah yang oleh partai politik diolah menjadi komoditas politik. Misalnya, Konferensi Partai Katolik Daerah Surakarta 6 Februari mengeluarkan pernyataan yang membenarkan pernyataan, bahwa barang-barang kebutuhan makin meningkat harganya dan keperluan perusahaan sukar didapat, walaupun ada dengan harga sangat tinggi. Karena itu kaum buruh dan tani makin sukar kehidupannya. Timbul banyak pengangguran. Konferensi partai menyerukan agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan ekonomi rakyat.

Meskipun berempati kepada kehidupan buruh dan mengangkatnya sebagai isu politik, namun Kongres Partai Katolik juga mengingatkan agar kaum buruh tidak masuk ke dalam arus perpolitikan. Buruh tak usah berpolitik, demikian bunyi pernyataan Partai Katolik. Partai memuji sarakat-sarakat yang berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan itu dengan kegiatan, tetapi tidak mengorbankan keutuhan bangsa. Mengingatkan adanya bahaya

yang mungkin timbul dari keadaan sulit ini (*Kedaulatan Rakjat*, 9 Februari 1955: 2).

SIMPULAN

Berdasar uraian di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, kegiatan dan aktivitas warga yang dipaparkan di atas baik dalam dalam berbagai kegiatan yang bersifat komunal atau partisipasi individu merupakan wujud partisipasi warga dalam ketahanan sosial masyarakat. Mereka dengan kesadaran diri secara kolektif berupaya mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi di era itu, 1950-an. Salah satu ciri ketahanan sosial masyarakat tahun 1950-an yang sangat menonjol adalah kolektivitas. Lewat berbagai kegiatan kolektif, anggota masyarakat menunjukkan kepedulian sosial mereka atas berbagai persoalan. Di sisi lain, berkembangnya partisipasi bersifat komunal yang melibatkan organisasi-organisasi politik, misalnya dalam aktivitas sosial seperti acara sunatan yang banyak diadakan oleh organisasi-organisasi Islam, adalah sebuah kemungkinan yang tidak lepas dari pemaknaan partisipasi yang politis sifatnya, bukan sekedar respon sosial pada masyarakat. Aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan organisasi-organisasi politik sendiri tidak lepas dari ideologi yang dianut/diyakini oleh masing-masing organisasi. Pembangunan masjid, sunatan massal, zakat, pembangunan gedung untuk sekolah Islam oleh organisasi Islam, penggalangan dana untuk pembangunan gereja bagi kelompok Kristen, serta bantuan untuk kuil yang dilakukan oleh kelompok Tionghoa, telah terperinci dan dipaparkan sebagai bukti partisipasi luas masyarakat di luar proyek pembangunan negara ketika itu.

Kedua, ruang budaya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari partisipasi sosial

warga. Melalui berbagai jenis seni pertunjukan, misalnya, terjadi pertemuan berbagai budaya yang kadang dimainkan dan dipadukan dalam satu panggung. Tipe kegiatan yang lain yang diinisiasi oleh kelompok warga biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah di sekitar mereka, seperti gabungan Rukun Tetangga dengan perkumpulan kematian yang sistemnya dapat menuju kemandirian warga dalam persoalan hajatan terkait penanganan kematian. Tipe kegiatan atas inisiasi warga sebetulnya telah ada dan tidak pernah mati meskipun tidak terdokumentasi dengan baik. Pola-pola yang mereka lakukan adalah kesadaran akan ketahanan diri sosial yang praktis akan menyelesaikan persoalan yang nyata dan tengah dihadapi. Di sinilah tampak bahwa bentuk-bentuk ketahanan sosial tersebut merupakan wujud kewargaan masyarakat dalam situasi ketika negara masih terlalu lemah ataupun absen dari upaya mensejahterakan rakyat.

Selanjutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, upaya menguatkan kapasitas masyarakat dalam hal ketahanan sosial mereka, sebaiknya dilandaskan pada identifikasi dan pemetaan tentang pengalaman masyarakat itu sendiri dalam menangani berbagai macam masalah kehidupan sehari-hari. Program-program penguatan ketahanan sosial masyarakat perlu dilandaskan pada pengetahuan dan pengalaman masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan dengan hal ini, studi-studi juga perlu menggali pengalaman dan pengetahuan masyarakat dalam hal ketahanan sosial, dan menghindari fokus pada model-model eksperimen program yang sifatnya *top-down*.

Kedua, meskipun istilah ketahanan sosial termasuk istilah kontemporer/kekinian, tetapi praktik dari apa yang kini disebut ketahanan

sosial telah ada di tengah masyarakat sejak dulu. Artikel ini mengambil kasus praktik-praktik ketahanan sosial masyarakat dari periode 1950-an, yaitu tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia ketika struktur negara masih dalam proses pembentukan dan program-program negara untuk kesejahteraan rakyat masih belum menemukan wujudnya. Karena itu, studi-studi dan pemahaman tentang ketahanan sosial perlu diperluas dalam hal rentang atau cakupan waktu. Dalam hal ini, pendekatan sejarah atas praktik ketahanan sosial masyarakat di masa lalu menjadi sangat penting dan relevan. Lewat kajian sejarah dapat diketahui proses perubahan makna ketahanan sosial sepanjang suatu rentang waktu, serta bentuk-bentuk dan konteks kemunculan ketahanan sosial masyarakat dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Muhammad Yamin No. 247 (Arsip Nasional Republik Indonesia/ANRI).
- Andriyani, Anak Agung Istri, Edi Martono & Muhamad, 2017, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah: Studi di Desa Wisata Panglipuran Bali", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, no. 1, hh. 1-16.
- Departemen Pendidikan Masyarakat, 1953, *Pendidikan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Departemen Penerangan, 1950, *Rentjana Mass Education*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Fakih, Farabi, 2013, 'The Rise of Managerial State in Indonesia', *Disertasi*, Universitas Leiden.
- Feith, Herbert, 1962, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Hooghe, Marc & Jennifer Oser, 2015, "T.H. Marshall's Concept of Political and Social Citizenship in Public Opinion: The Dual Structure of Democratic Ideals in Europe." *Paper*, presented at the Dutch-Belgian Political Science Conference, Maastricht, 11-12 June.
- Horowitz, Donald L., 2013, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*, Cambridge: Cambridge University Press. hh. 60—61.
- Ismail, 2015, "Optimalisasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat—Program Ibu Mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga (Studi di PKPU Yogyakarta)", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21, no. 3, hh. 145-155.
- Keck, Markus & Patrick Sakdalporak, 2013, "What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward", *Erkunde*, Vol. 67, no. 1, hh. 5-19.
- Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, 1951, *Pendidikan Masyarakat di Indonesia: Sumbangan berdasarkan Pengalaman Kami dengan Implementasi Pendidikan Massa di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- Kuntowijoyo, 2003, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leitch, Laurie, "An Introduction to the Social Resilience Model", ??? diakses 2 November 2017
- Marshall, T.H. 2009, "Citizenship and Social Class", dalam *Inequality and Society*,

- ed. Jeff Manza & Michael Sauder. New York: W.W. Norton & Co., hh. 148-154.
- Nordholt, Henk Schulte, 2011, 'Modernity and Cultural Citizenship in the Netherlands Indies: An Illustrated Hypothesis', *Journal of Southeast Asian Studies* Vol 42 no. 3, hh. 435-457.
- Raharjo, Armawi, Armaidid & Joko Soerjo, 2017, 'Penguatan Civic Literacy dalam Pembentukan Warga Negara yang Baik (Good Citizen) dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi tentang Peran Pemuda HMP Demokratia pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah)', *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, no. 2, hh. 51-74.
- Surat Kabar Sejaman**
- Harian Umum*, 25 Oktober 1951, 'Petani Berkongres'
- Harian Umum*, 2 November 1951, 'Madura: Kursus Bahasa Indonesia'
- Harian Umum*, 16 November 1951, 'Kediri: Acara Hari Peladjar Sedunia'
- Harian Umum*, 26 November 1951, 'Pamekasan: Kursus Kader Tani Wanita'; 'Pamekasan: Ketegangan di BAT Pamekasan 2 Orang Pimpinan Buru Dilepas'.
- Harian Umum*, 17 Desember 1951, 'Madiun: Protes terhadap A.S.S.I'; 'Penerangan Kewarganegaraan di Rumah Penjara Kalisosok'
- Kedaulatan Rakjat*, 8 Februari 1955, h. 2, 'Pemuda Rakjat dan Bencana Alam'' 'Rukun Wanita Prambanan akan Adakan Peringatan'
- Kedaulatan Rakjat*, 9 Februari 1955, h. 2, 'Seharusnja Sarekat-sarekat Buruh Tak Berpolitik'
- Kedaulatan Rakjat* 17 Februari 1955, h. 2, 'Pernyataan Sebda Klaten'; 'Pengusaha-pengusaha Titipan Sepeda Protes'
- Kedaulatan Rakjat* 17 Februari 1955, h. 2, 'Keadaan Pengangguran di Daerah Kedu'
- Kedaulatan Rakjat* 21 Februari 1955, h. 2, 'Semarang: Konferensi Perdamaian'
- Kedaulatan Rakjat*, 12 Mei 1955, 'Penduduk RK Kricak Minta Listrik'
- Kedaulatan Rakjat*, 14 Mei 1955, h. 2, 'Hari Kebangunan Nasional akan Diusahakan oleh PPN'
- Harian Rakjat*, 15 Desember 1957 h. 2, 'Panglima Kodam III/17 Agustus: Bukan Revolusi Tentara dan Pemuda. Revolusi Kita adalah Revolusi Bersama'
- Pemandangan*, 1 Oktober 1956, 'Persatuan Buruh Philips Djakarta'; 'Organisasi Kebathinan Baru'
- Pemandangan*, 8 Oktober 1956, "Masjumi dan Korban Kebakaran"
- Pemandangan*, 1 November 1956, 'Sekeliling Nusantara'
- Pemandangan*, 8 November 1956, 'Pertundjukan Seni Balet Untuk Amal';
- Pemandangan*, 14 November 1956, 'Bazar makan Iternasional'
- Pemandangan*, 22 November 1956, "Dengan Gotong Rojong membangun masjid 17 Agusut"
- Pemandangan*, 11 Desember 1956. 'Kursus2 Sosial dengan biaja masjarakat Kabupaten Garut.
- Pemandangan* 22 Desember 1956, "Desa Tertutup Dibuka Kembali"

- Pemandangan*, 27 Desember 1956, 'Hasil Gerakan Sosial Kotabesar Bogor'
- Pemandangan*, 23 Feb 1957, 'Murid Sekolah Rakjat Bermal'
- Sin Po*, 8 Juni 1955 hlm. 11, 'Tugas Sosialis Asia djadi pelopor pembangunan Asia. Konferensi Asia Afrika tanda perkembangan apa jang diandjurkan oleh PSI sejak 1948'
- Suara Masjarakat*, 16 Juli 1951, 'Pedagang Ketjil Tuntut Tempat dan Kerugian'
- Suara Masjarakat*, 10 Juli 1952, "Zakat Fitrah di Blitar"
- Suara Masjarakat*, 22 Juli 1952, 'Ikatan Pemuda Peladjar Kalipare Pangak'
- Suara Masjarakat*, 9 Agustus 1952, 'Chung Lien Hui Tjabang Solo Bermal'; 'Taman Pembatjaan Model Desa dan Radio Umum'
- Suara Masjarakat*, 12 Agustus 1952, 'İPPS Berdiri'
- Suara Masjarakat*, 16 Agustus 1952, 'Systeem Saleh-Marsman Tjiptakan Manusia Kreatif'
- Suara Masjarakat*, 18 Agustus 1952, 'Gotong Rojong Perbaikan Djalan'
- Suara Masjarakat*, 20 Agustus 1952. 'Salah Satu Nomor dari Malang Kiddies'; 'Winangan Membangun'
- Suara Masjarakat*, 23 Agustus 1952, "Djembatan Gotong Rojong"
- Suara Masjarakat*, 25 Agustus 1952, 'Rp. 10.000 Sumbangan dari Djakarta'
- Suara Masjarakat*, 28 Agustus 1952 (berita tanpa judul)
- Suara Masjarakat*, 30 Agustus 1952, 'İdul Adcha dari Tahun ke Tahun'
- Suara Masjarakat*, 2 September 1952 (berita tanpa judul)
- Suara Masjarakat*, 9 September 1952. 'Kegiatan Organiasi² Islam dalam Lapangan Sosial'; 'Kegiatan Organisasi Islam di Lapangan Sosial'
- Suara Masjarakat*, 12 September 1952, 'Sekolah Usaha Rakjat'
- Suara Masjarakat*, 16 September 1952, 'Chitanan Umum'
- Suara Masjarakat*, 18 September 1952 (berita tanpa judul)
- Suara Masjarakat*, 7 Oktober 1952, 'Persatuan Tani'
- Suara Masjarakat*, 16 Oktober 1952, 'Aku Bertobat'
- Suara Masjarakat*, 17 Oktober 1952, 'Kumpulan Kematian dan Kontribusi'
- Suara Masjarakat*, 20 Oktober 1952, 'Mardi Gemi Tulung Agung'
- Suara Masjarakat*, 21 Oktober 1952, 'Pengumuman'
- Suara Masjarakat*, 24 Oktober 1952, 'Desa Padike Bentuk Koperasi'
- Suara Masjarakat*, 12 November 1952, 'Mendirikan Madrasah Guna Kemajuan Ketjamatan dan Sedanja'
- Suara Masjarakat*, 5 Oktober 1956, 'Sumbangan untuk Memajukan Pendidikan dan Pengadjaran'
- Suara Masjarakat*, 10 November 1956, 'Chitnan Anak² Jatim Piatu'
- Suara Masjarakat*, 21 Desember 1956, 'Pertundjukan Hari Natal Di Gedung Pemuda'
- Suara Masjarakat*, 10 Januari 1957, 'Pertundjukan Seni Tari Bali Hanja Mendapat Rp 3730'